



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KALABAH

JL. Jend. Sudirman No. 20, Kalabahi KAB. ALOR

NUSA TENGGARA TIMUR

<http://www.pn-kalabahi.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,58%

Jumlah	171 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 127 PEREMPUAN : 44
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 1 Diploma 2 : 1 SD : 2 Diploma 3 : 6 SMP : 4 S1 : 64 SMU : 91 S2 : 2 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 21 TNI : 1 SWASTA : 57 POLRI : 22 WIRASAHA : 30 TENAGA KONTRAK : 8 LAINNYA : 32

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 3,965
2. Apakah pernah mengetahui ada praktik percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,971
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,982

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Transparansi Pembayaran:

Memberikan Briefing kepada Petugas PTSP saat briefing harian maupun pada saat rapat berjenjang, bahwa jika ada pungutan PNBP saat selesai pelayanan maka harus memberikan kwitansi / tanda terima bagi pengguna layanan selain itu Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai transparansi bagi pelayanan juga selalu mempublikasikan panjar biaya perkara perdata dan tarif pemungutan PNBP pada ruang PTSP maupun pada Website Pengadilan Negeri Kalabahi juga biaya sisa panjar perkara dikembalikan pada para pihak secara elektronik melalui transfer Bank pada rekening para pihak.

2. Percaloan

Penanganan percaloan di Pengadilan Negeri Kalabahi ditangani secara serius dan terpadu, hal ini melibatkan upaya dari berbagai pihak untuk memastikan integritas pengadilan dan keadilan bagi masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah dan mendeteksi praktik percaloan, Ini bisa dilakukan melalui audit internal berkala, pemantauan aktivitas di pengadilan, serta peningkatan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi percaloan, serta mempublikasikan mekanisme dan media pengaduan pada ruang terbuka PTSP pada Website Pengadilan Negeri Klabahi.

3. Menjual Pengaru

Pencegahan Mengenai menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Kalabahi meliputi melakukan briefing kepada petugas PTSP untuk bekerja secara profesional sesuai tupoksi masing-masing dan melakukan pembinaan pada saat rapat bulanan agar seluruh ASN bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 September 2025
Ketua Pengadilan Negeri